



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum kepala daerah atau biasa disebut pilkada merupakan buah demokrasi dari Negara Indonesia. Sejak tahun 2005 pergantian kepala daerah baik itu gubernur, bupati atau walikota di seluruh Indonesia telah dilakukan secara langsung. Seperti halnya yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (5) yang menyatakan :

Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Namun pada tahun 2014 terjadi sebuah fenomena politik, yakni wacana Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung (dipilih oleh DPRD). Hal ini menimbulkan polemik bagi masyarakat, RUU Pilkada menjadi ramai dibicarakan dengan segala pro-kontra yang ada. Wacana RUU Pilkada sempat diusulkan pada tahun 2012 dan ditolak oleh semua partai, namun pemberitaannya tidak seramai tahun 2014. Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Pilkada menjadi salah satu topik politik terhangat dalam pemberitaan media online dan media sosial, pada bulan September 2014 terdapat 8.490 pemberitaan mengenai RUU Pilkada (Ruslan, 2014)

Terkait perubahan RUU Pilkada, terdapat dua kubu politik yang bertolak belakang, yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan kubu Koalisi Merah

Putih (KMP). KIH yang mendukung pilkada langsung terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). KMP yang menolak pilkada langsung terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono berada diantara kedua kubu tersebut. Situasi antara KMP dan KIH cukup ketat, jumlah kursi KMP sebesar 278, sedangkan jumlah kursi KIH jika ditambah Demokrat sebesar 282, sehingga Partai Demokrat menjadi sorotan, karena mereka yang akan menjadi penentu kemana arah RUU tersebut. Melalui *Youtube*, tanggal 16 September 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan mendukung Pilkada langsung, Ia mengatakan bahwa proses demokrasi yang sudah dilakukan 10 tahun selama masa pemerintahannya patut dipelihara dan dilanjutkan dengan beberapa perubahan yang diakibatkan oleh pilkada secara langsung selama ini. Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarif Hasan juga memberi pernyataan bahwa Partai Demokrat secara tegas menyatakan bahwa pilihan Partai Demokrat adalah pilkada langsung dengan catatan ada 10 perbaikan yang harus dilakukan dan dimasukkan dalam RUU Pilkada (Syah, 2004).

Wacana perubahan RUU Pilkada berakhir pada 26 September 2014 dalam Rapat Sidang Paripurna RUU Pilkada. 129 orang Fraksi Partai Demokrat yang memilih untuk abstain dan *walk out* meninggalkan sidang paripurna seturut aba-aba dari Benny K. Harman selaku ketua DPP Partai Demokrat, padahal

suara Partai Demokrat jelas menentukan nyawa demokrasi pilkada langsung. Sebelumnya, Partai Demokrat menyatakan mendukung mempertahankan pilkada langsung tetapi harus dengan syarat mutlak, yaitu DPR harus setuju dengan 10 syarat yang disebutkan. Dengan usulan Demokrat itu, maka akan terdapat tiga opsi, yaitu opsi pilkada tetap langsung oleh rakyat, pilkada tidak langsung, dan ketiga pilkada langsung dengan 10 syarat mutlak yang disampaikan Demokrat itu. Usulan tersebut disetujui oleh PDIP dan PKB, namun semua fraksi dari Koalisi Merah Putih menolaknya. Benny K Harman melanjutkan jalannya rapat dengan pernyataan:

“Sebagai partai yang menjunjung tinggi kesantunan, kami tidak ingin keberadaan kami menjadi persoalan ... Dengan demikian, kami mengambil sikap netral dan walkout dari persidangan” (Ramli, 2015).

Untuk mengakhiri sidang tersebut, diadakan pemungutan suara (*voting*), dan hasilnya ialah 135 orang mendukung pilkada langsung, dan 226 orang mendukung pilkada tidak langsung, maka ditetapkan keputusan RUU Pilkada tidak langsung (Heru, 2014).

Keputusan *walk out* Partai Demokrat menuai banyak kecaman dan kekecewaan dari berbagai pihak. Salah satu reaksi kekecewaan masyarakat dituangkan dalam media sosial *Twitter*, berdasarkan pantauan lembaga Politicawave yang memantau pembicaraan lewat sosial media menunjukkan tagar *#ShameOnYouSBY* dengan jumlah percakapan 97,500 *tweets* menjadi trending topik dunia. Tagar tersebut dimotori oleh sejumlah tokoh terkenal dari berbagai kalangan dan golongan seperti dari ranah dunia hiburan, penulis, motivator serta tokoh politik seperti *@jokoanwar*, *@deelestari*, *@glenfredly*,

@pandji, @renecc, @zuhairimisrawi, @fadjoel, dan sederet tokoh-tokoh terkenal lainnya.

Pendiri politicawave Yose Rizal mengatakan bahwa melalui sosial media *netizen* mengaku terkejut dan kecewa terhadap SBY, maka tak heran jika dengan jumlah percakapan mendekati angka 100,000 *tweets* untuk topik tersebut menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di sosial media. *Netizen* mempertanyakan sosok SBY yang menjabat sebagai ketua umum, ketua Dewan Pembina sekaligus ketua Majelis tinggi demokrat di mata Partai binaannya sendiri (Wardhy, 2014).

Sebagai salah satu fenomena besar dalam dunia politik, polemik mengenai RUU Pilkada ternyata juga memiliki nilai tinggi bagi media massa. Tidak semua peristiwa mempunyai nilai berita sehingga layak dipublikasikan di media massa. Parameter media dalam menyeleksi isu yang layak dijadikan berita yaitu mengandung konflik, bencana dan kemajuan, dampak, kemasyuran, segar dan kedekatan, keganjilan, dan human interest.

1. Konflik : Selain konflik fisik, debat-debat yang menyangkut kualitas dari kehidupan mendapat tempat yang penting dalam pemberitaan.
2. Kemajuan dan Bencana : Dari konflik akan menyusul kemenangan suatu pihak dan kekalahan bagi pihak lainnya.
3. Konsekuensi (dampak) : Suatu peristiwa dapat menimbulkan rangkaian peristiwa yang mempengaruhi banyak orang.
4. Kemasyuran (terkemuka) : Nama membuat berita dan nama besar membuat berita lebih besar.

5. Kedekatan : Ukuran yang diterapkan untuk menentukan layak berita.
6. Kegajilan : Kejadian-kejadian luar biasa, aneh, dan unik
7. *Human interest* : Menyangkut hal kemanusiaan, kejadian-kejadian dramatis, motivasi, ambisi, kerinduan, kesukaan, dan lain sebagainya (Ishwara, 2011 : 77-80).

Dalam kasus *walk out* Partai Demokrat, terkandung nilai berita setidaknya sebagai berikut:

1. Konflik

Ketika terjadi perbedaan pendapat antara dua individu atau lebih yang makin meruncing dan tersebar luas, serta banyak orang yang menganggap perselisihan tersebut dianggap penting untuk diketahui, maka perbedaan yang semula urusan individual, berubah menjadi masalah sosial. Di sinilah nilai berita tersebar dari sikap *walk out* Partai Demokrat, yang bertolak belakang dengan pernyataan SBY sebelumnya, hal kemudian menjadi masalah sosial karena putusan sidang menyangkut kepentingan rakyat.

2. Kemajuan dan Bencana

Kemajuan bagi pihak yang menang dalam rapat paripurna yakni KMP dan pihak-pihak yang mendukung pilkada oleh DPRD dan bencana bagi yang kalah yakni KIH dan pihak-pihak yang mendukung pilkada langsung.

3. Dampak

Informasi yang disebarkan memiliki dampak terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat bahkan secara fundamental mempengaruhi seluruh sistem dimana masyarakat itu berada. Topik ini tentu saja memiliki dampak yang besar di kalangan masyarakat, karena sikap Partai Demokrat berpengaruh terhadap tatanan RUU dari pilkada langsung menjadi pilkada tidak langsung yang mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia.

4. Kemasyuran (terkemuka)

Banyak nama-nama besar yang ada dalam peristiwa ini salah satunya yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

5. Kedekatan

Peristiwa ini terjadi di Indonesia dan pemilukada dilakukan di seluruh Indonesia, sehingga unsur kedekatan termasuk salah satu unsur yang ada dalam topik ini.

Dalam penelitian ini, penulis ingin melihat bagaimana media mengkonstruksi sikap *walk out* Partai Demokrat. Penulis memilih majalah mingguan Tempo dan Gatra sebagai objek penelitian karena Majalah Tempo dan Gatra merupakan majalah terbesar dan terpopuler di Indonesia dalam hal pemberitaan politik. Majalah Tempo dan Gatra juga memiliki pendistribusian yang besar di seluruh Indonesia. Masing-masing media memiliki oplah yakni lebih dari 100.000 eksemplar per-minggu (Tn. 2013).

Tempo sebagai media massa dikenal berani meyuarkan aspirasinya secara frontal lewat tulisan-tulisannya yang mengundang kontroversi. Sejak awal didirikan, Tempo sudah tiga kali dibredel, namun Tempo tetap bertahan hingga saat ini (tempo.co). Selain itu Tempo dan Gatra merupakan majalah yang sudah berdiri sejak lama dan tetap mampu menjaga eksistensinya sampai saat ini, Tempo pertama kali terbit tahun 1970 dan Gatra mulai terbit tahun 1994.

Sebagai sebuah media massa yang aktif dalam mengkomunikasikan hal politik, tentu saja Majalah Tempo dan Gatra menjadi penggerak opini publik, yaitu upaya membangunkan sikap dan tindakan khalayak mengenai suatu masalah politik atau aktor politik (Nimmo, 1989: 5). Bentuk pembicara politik dalam media antara lain berupa teks atau berita politik yang di dalamnya terdapat simbol-simbol politik (Hamad, 2004: 9). Oleh karena itu, media massa menjadi saluran yang banyak digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan politik, demikian pula hal-nya yang dilakukan Tempo dan Gatra.

Melalui Analisis *framing* model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penulis ingin melihat bagaimana kedua majalah tersebut mengkonstruksi sikap *walk out* Partai Demokrat. Perangkat *framing* Pan dan Kosicki terdiri atas cara wartawan menyusun berita (sintaksis), cara wartawan mengisahkan fakta (skrip), cara wartawan menulis fakta (tematik), dan cara wartawan menekankan fakta (retoris). Perangkat ini dipakai karena penulis melihat pemakaian kata, pemilihan struktur, dan bentuk kalimat tertentu oleh Tempo dan Gatra dalam mengemas tulisan mengenai sikap *walk out* Partai Demokrat.

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana majalah Tempo dan Gatra melakukan *framing* terhadap Sikap *walk out* Partai Demokrat pada Sidang Paripurna RUU Pilkada?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana *framing* yang dilakukan Majalah Tempo dan Gatra terhadap Sikap *Walk Out* Partai Demokrat pada Sidang Paripurna RUU Pilkada, sehingga dapat menggali sudut pandang Majalah Tempo dan Gatra.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Sumber pengetahuan mengenai pembingkaihan yang dilakukan media cetak terhadap Sikap *Walk Out* Partai Demokrat pada Sidang Paripurna RUU Pilkada, khususnya untuk bidang jurnalistik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membuat para pembaca media cetak dapat lebih kritis dalam menanggapi suatu masalah dan fenomena politik.